



Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum:  
Theo L Sambuaga

Wakil Pemimpin Umum:  
Randolph Latumahina

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:  
Primus Dorimulu

Editor at Large:  
John Riady

# Bulog dan Ketahanan Pangan Nasional?

Akhir-akhir ini berkembang pemikiran agar Perum Bulog dibubarkan saja. Tulisan ini mencoba menyampaikan pemikiran bahwa struktur perusahaan umum (Perum) bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang memiliki sifat *public goods*. Penulis mencoba menggunakan teori bahwa kinerja atau performa (*performance*) yang kita amati adalah hasil dari perilaku (*behavior*) di mana perilaku tersebut dikondisikan oleh struktur (*structure*) yang dibangun dan daya kendali struktur untuk mengendalikan perilaku ditentukan oleh sumber-sumber interdependensi dari para partisipan (Situation) (Schmid, 1978;1987).

Dalam menerapkan teori di atas, penulis menggunakan kasus Perum Perhutani dalam mengendalikan *public goods* berupa hutan di Jawa sebagai bahan pembelajaran untuk Perum Bulog. Dalam konteks ini, kita menerima keadaan *second best* atau *third best*, dalam menilai kinerja Perum Perhutani.

Perum Perhutani merupakan evolusi dari Dinas Kehutanan. Perum Perhutani di Jawa Tengah (Unit I) dan Jawa Timur (Unit II) berdiri pada tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1972. Sedangkan Perum Perhutani di Jawa Barat (Unit III) berdiri pada tahun 1986 yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1986, setelah 14 tahun pembelajaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya, setelah mengetahui hasil di Unit I dan II lebih baik.



AGUS  
PAKPAHAN

Permasalahan kehutanan di Jawa sangatlah kompleks. Perum Perhutani menunjukkan keberhasilannya mengelola kompleksitas tersebut dengan ukuran kawasan hutan (sekitar 2,4 juta hektare) yang terjaga, manajemen hutan yang dinamis, khususnya dalam mengembangkan kelembagaan kehutanan yang berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian prinsip ilmu pengetahuan kehutanan dan seni dalam melaksanakannya telah diterapkan oleh Perum Perhutani dan berhasil dalam mewujudkan kelestarian hutan di Jawa.



**Ketahanan pangan juga mengandung banyak sifat "public goods". Irigasi dan bendung untuk menampung dan mengatur air adalah "public goods" yang langsung menentukan berhasil-tidaknya produksi pertanian.**

Sebaliknya, kinerja kelestarian hutan di luar Jawa yang dikelola oleh struktur perseroan terbatas (PT) baik dalam hal konteks kelestarian hutan maupun dalam hal pengembangan sistem manajemen hutan alam tropika, tampaknya belum berkembang

dengan baik.

## Meningkatkan Diri

Ketahanan pangan juga mengandung banyak sifat *public goods*. Irigasi dan bendung untuk menampung dan mengatur air adalah *public goods* yang langsung menentukan berhasil-tidaknya produksi pertanian. Demikian juga pengendalian wabah hama dan penyakit tanaman merupakan *public goods* yang menentukan keberhasilan pertanian. Apalagi R&D bagi petani juga banyak memiliki elemen *public goods*. Subsidi pertanian di negara lain juga merupakan *public goods* di sana yang menjadi *public bads* di sini. Apakah struktur Perum untuk Bulog merupakan struktur yang bisa mengendalikan para pelaku partisipan sehingga terbentuk kinerja yang diharapkan seperti harga beras yang stabil atau pendapatan petani yang terjaga?

Sumber interdependensi (situasi) yang paling berat dalam bidang kehutanan, dalam pengertian perusahaan swasta atau individu melakukan keputusan investasi untuk kelestarian hutan, adalah masa waktu tanam dan panen yang sangat panjang, misalnya 30 tahun atau bahkan 80 tahun untuk hutan jati pada masa pengelolaan oleh Belanda. Satu faktor ini saja sudah memberikan gambaran bahwa bukan lagi kita berbicara faktor risiko tetapi kita masuk dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty*). Karena itu, dunia perbankan tidak akan bisa masuk ke sektor pengelolaan hutan kecuali apabila kita sudah bisa memperjualbelikan riap (*growth*) tegakan hutan sebagai *stock* sebagaimana yang berlaku di pasar modal.

**Bersambung ke halaman A 11**

## Bulog dan Ketahanan Pangan Nasional?

Sambungan dari halaman A 10

Jadi, pengelolaan hutan jauh lebih sulit daripada pengelolaan ketahanan pangan yang lebih banyak berhubungan hanya dengan faktor risiko dan jangka waktu yang jauh lebih pendek.

Makna dari pengenalan sumber interdependensi di atas adalah bahwa Bulog sebagai

Perum memiliki kapasitas untuk meningkatkan dirinya agar memiliki kapabilitas mengendalikan sumber interdependensi seperti fluktuasi harga beras dengan mengubah budaya kerja, cara kerja, sistem kerja dan organisasinya yang disesuaikan dengan ciri intrinsik dalam ketahanan

pangan.

Perum Bulog bisa mendirikan anak-anak perusahaan baik dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun koperasi bekerjasama dengan mitra-mitra strategis khususnya para petani.

Bahkan Bulog perlu juga mendirikan

anak perusahaan, misalnya: Bulog Global, yang secara khusus menangani pasar pangan di luar negeri.

PENULIS ADALAH DEPUTI MENTERI BUMN  
BIDANG USAHA AGROINDUSTRI, KEHUTANAN,  
KERTAS, PERCETAKAN DAN PENERBITAN 2005-2010